

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surabaya adalah salah satu kota dagang utama yang menjadi andalan oleh pemerintah Hindia Belanda.¹ Sebelum menjadi salah satu kota andalan pemerintah Hindia Belanda, Surabaya telah dikenal memiliki peranan penting baik saat masa kerajaan maupun masa pemerintahan kolonial.² Peran yang selalu dipegang oleh Surabaya menjadi sangat krusial sebab keberadaan Kota Surabaya menurut Nasution merupakan sebuah kawasan ekonomi yang memiliki peranan penting bagi pemerintah kolonial, di samping sebagai penghasil komoditas ekspor, seperti tebu, serta termasuk sebagai daerah industri dan perdagangan.³

Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, Surabaya dijadikan sebagai salah satu bengkel kerja bagi Hindia Belanda, dengan industri yang berperan untuk menyokong industri perkebunan gula, perkeretaapian, dan perkapalan. Meskipun pada awalnya tujuan dari pembangunan industri untuk melayani golongan bangsa Eropa yang tinggal di Surabaya. Tetapi, pemerintah melihat peluang industri menjadi salah satu penyokong yang mampu membantu

¹ J. Stroomberg (diterjemahkan oleh Heri Apriyono), *Hindia Belanda 1930*, (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD kerja sama dengan penerbit IFADA, 2018), hlm.383.

² Nasution, *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930)*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Intelektual, 2006), hlm. 5.

³ Nasution, *Op Cit*, hlm. 125.

industri perkebunan gula dan industri lainnya.⁴ Kemajuan dalam bidang industri juga dibarengi dengan pesatnya perdagangan di Surabaya. Hasil dari industri tersebut, kemudian dapat didistribusikan melalui pasar-pasar yang ada di Surabaya. Pada dasarnya pasar merupakan pusat aktivitas penduduk di wilayah tersebut yang berupa representasi dari perkembangan masyarakat suatu wilayah.⁵

Kondisi dan pengelolaan pasar-pasar tradisional pada awal terbentuknya Kota Surabaya, masih menunjukkan tidak tertangani dengan memadai. Hal tersebut yang mendorong pemerintah kolonial secara serius memberi wewenang kepada Kotapradja Surabaya untuk menangani secara serius masalah yang berhubungan dengan perekonomian penduduk pribumi⁶. Keseriusan pemerintah kolonial dalam mengerjakan penanganan masalah yang berhubungan dengan perekonomian penduduk pribumi dapat dilihat ketika keluarnya putusan pemerintah kolonial tertanggal 15 Juli 1873 No. 37 yang berisi pemerintah menganggap penting perdagangan domestik kecil sehingga di semua titik perdagangan dibangun sebuah pasar.⁷

⁴ H. W. Dick, *Surabaya City of Work A Socioeconomic History, 1900-2000*, (Ohio: Ohio University Press, 2002). Hlm. 253

⁵ Listyana Dana, *Tumbuh dan Berkembangnya Suatu Pasar Kota: Pasar Cina Pontianak Abad ke-19-20*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian dan Kebudayaan, 2013), hlm. 4.

⁶ Putri Agus Wijayati, *Eksistensi Pasar-Pasar Tradisional di Surabaya Era Kolonial*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008), hlm. 19.

⁷ Kolonial Tijdschrift 1913, "Het en ander over het 'Pasar' of Marktwezen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera", Uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlands Indie, hlm. 1095, termuat dalam Putri Agus Wijayati, *Ibid*, hlm. 24.

Hal tersebut menunjukkan keberadaan pasar sangat penting dalam perdagangan. Oleh sebab itu, kemunculan beragam pasar di Kota Surabaya menyebabkan perdagangannya menjadi semakin berkembang pesat. Berdasarkan jenisnya, pasar terbagi menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di dalam pasar terdapat beragam aktivitas yang bisa dilakukan, salah satunya tawar menawar. Fenomena tawar menawar merupakan ciri khas yang hampir selalu ada dalam sebuah pasar. Akan tetapi, fenomena tersebut sering sekali muncul, baik pada masa kolonial hingga pasca kemerdekaan. Hal itu berbanding terbalik dengan pasar modern menurut Melano yang menjelaskan bahwa dalam pasar modern proses jual beli yang berlangsung tidak perlu memakai proses tawar menawar. Melainkan menggunakan proses langsung membayar berdasarkan label harga yang tertera di dalam barang yang akan dibeli oleh konsumen kepada pramuniaga yang bertugas ataupun pembayaran secara mandiri (swalayan).⁸ Sehingga, proses jual beli yang ada di dalam pasar modern lebih cepat.

Selain itu pasar juga memiliki beberapa kategori, di antaranya ada pasar pusat atau pasar induk yang disebut juga pasar besar yang sebagian besar aktivitasnya bergerak dalam melayani penjualan barang-barang grosir. Ada pula yang disebut pasar lokal atau pemerintah kolonial menyebutnya pasar domestik kecil yang sebagian besar kegiatannya menangani perdagangan eceran.⁹

⁸ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 76.

⁹Putri Agus Wijayati, *Op.cit* , hlm. 24

Pada pertengahan tahun 1920-an pasar *bedrijf* yang masih berada di bawah pemerintah Hindia Belanda mulai banyak membangun pasar yang bersifat permanen.¹⁰ Usaha Pasar *Bedrijf* untuk bisa mengeksploitasi pasar dengan jumlah uang yang dikeluarkan memang masih belum mampu mendapatkan laba yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Akan tetapi, hal yang dilakukan tersebut tidak mampu membuat pasar menjadi semakin maju. Oleh sebab itu penghasilan dari pasar-pasar yang ada di Surabaya semakin menurun hingga tahun 1940.¹¹ Setelah kemerdekaan, pasar Wonokromo menjadi salah satu pasar yang semakin banyak dikenal. Meskipun ada beberapa pasar yang di kemudian hari mampu menjadi pasar modern. Pasar tersebut biasanya termasuk ke dalam pasar yang melayani pembelian secara grosir, antara lain Pasar Besar, Pasar Pabean, Pasar Turi, dan Pasar Wonokromo. Keberadaan pasar-pasar tersebut juga terkadang menjadi tempat bagi para pedagang untuk melakukan transaksi dalam pembelian secara grosir, untuk dijual kembali. Meskipun, terkadang ada pula pembeli yang membeli barang yang mereka butuhkan secara eceran. Salah satu pasar yang dikenal tersebut ialah pasar Wonokromo.

Pasar Wonokromo juga bermula dari sebuah pasar tradisional yang lebih sering disebut dengan “Pasar Krempeyeng”.¹² Jika melihat asal mulanya,

¹⁰ Howard Dick, *Surabaya City of Works : A Socio Economic History 1900-2000*, (Ohio: Ohio University Press, 2002), hlm. 194.

¹¹ Arsip Kota Surabaya, Box 35, No. 1289, Tahun 1953, Politik Perusahaan Pasar. Dikutip dalam skripsi Faridatun Ni'mah, *Aktivitas Pasar Gubeng Masjid Surabaya Tahun 1930-1982*, (Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya:2017), hlm. 50.

¹² Takun Musdha Wirhantoro, *Pasar Wonokromo 1951-1955*, (Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya: 2007), hlm. 1.

keberadaan pasar krempyeng di Surabaya dapat dipastikan berada di persimpangan atau jalur lalu lintas yang sering dilewati oleh kendaraan.¹³ Letak pasar Wonokromo yang berada di salah satu gerbang masuk utama di Kota Surabaya membuat pasar Wonokromo selalu ramai dikunjungi oleh berbagai macam orang.

Di tahun 1950, setelah melewati dampak pertempuran di Surabaya, pemerintah memutuskan untuk membangun ulang bangunan Pasar Wonokromo.¹⁴ Alih kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah Indonesia menyebabkan ada beberapa peraturan yang harus diubah. Perubahan dilakukan karena peraturan pasar sebelumnya merupakan warisan kolonial. Pemerintah kota Surabaya mengubah beberapa pasal yang termuat. Perubahan yang dibuat berhubungan dengan isi peraturan pasal, istilah yang dipakai, perijinan, pasar partikelir, pasar liar, jam buka tutup pasar serta tarif karcis yang diberlakukan untuk pedagang.¹⁵

Sejak pengelolaan pasar dipegang oleh Pemerintah Kotapradja Surabaya muncul berbagai macam penyimpangan yang ada di Pasar Wonokromo, di antaranya ialah penyimpangan yang melibatkan beberapa oknum pegawai perusahaan pasar melakukan tindakan curang, seperti mengambil barang dagangan pedagang buah tanpa membayar, meminta uang keamanan dengan

¹³ Dukut Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe : Jilid 1* (Surabaya: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, 2002), hlm. 196.

¹⁴ H. W. Dick, *Loc.cit*, hlm 235

¹⁵ Suhartoko, dkk., *Sejarah Pasar Kota Surabaya 1870-1999*, (Surabaya: Laporan Penelitian PD Pasar Surya, 2006), hlm. 81-83.

jumlah yang tidak sesuai dengan peraturan pasar, hingga meminta uang pungutan yang tidak ada dalam peraturan pasar dari pemerintah Kota Surabaya.¹⁶

Selain itu, ada seorang pedagang di Pasar Wonokromo yang melaporkan mengenai pencabutan paksa kepemilikan kiosnya oleh seorang oknum pengelola kios.¹⁷ Tidak hanya penyimpangan tersebut yang pernah terjadi di Pasar Wonokromo, ada pula permasalahan mengenai adanya penarikan uang keamanan oleh sekelompok orang yang mengaku uang tersebut digunakan sebagai uang keamanan bagi para pedagang di sana.¹⁸ Para pedagang yang merasa resah dengan peristiwa tersebut, kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak pengelola pasar.¹⁹

Banyaknya penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo selama kurun waktu 1953 hingga 1966 menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut lagi. Penyimpangan dari beberapa peristiwa yang terjadi tersebut memiliki faktor penyebab munculnya penyimpangan yang menyebabkan penyimpangan tersebut terjadi, hingga penyelesaian akhir dari penyimpangan tersebut yang kebanyakan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Pihak tersebut diwakili dari pemerintah

¹⁶ Arsip Kota Surabaya No. 7600/15, Tahun 1953 perihal Tindakan Tegas dan Nyata terhadap Pegawai Pasar yang Curang dan Arsip Kota Surabaya No. 7600/1016/60, Tahun 1960, Ketidak beresan di Pasar Wonokromo.

¹⁷ Arsip Kota Surabaya No. 1438, Tahun 1966, Berkas Laporan Pemakaian Stand di Pasar Baru Wonokromo a.n. Sujati untuk Menjual Ikan Daging/Basah di Pasar Baru Wonokromo A.27.261.

¹⁸ Arsip Kota Surabaya No. 1460, Tahun 1953, Surat Urusan Perusahaan-perusahaan kepada Kepala Perusahaan Pasar Perihal Penertiban dan Keamanan Pasar Baru Wonokromo.

¹⁹ Ibid.

Kota Surabaya yang memiliki peran tersendiri dalam keberlangsungan penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah pasar akan terus berkembang, seperti Pasar Wonokromo. Selama perkembangan Pasar Wonokromo telah terjadi berbagai permasalahan, termasuk penyimpangan yang juga mewarnai perkembangan Pasar Wonokromo. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo tak sepenuhnya sama dengan penyimpangan yang terjadi di pasar-pasar lainnya. Menurut arsip yang penulis peroleh dari Arsip Kota Surabaya, penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo lebih cenderung mengenai penyimpangan pengelolaan yang ada di Pasar Wonokromo.

Mulai dari penyimpangan penggelapan dana pegawai Perusahaan Pasar yang dilakukan oleh oknum pegawai hingga permasalahan ancaman pembakaran stan oleh beberapa oknum anggota Angkatan Laut yang mengancam seorang pedagang bernama Asmat. Akan tetapi dari pihak pemerintah Kota memberikan perhatian dan cara penyelesaian permasalahan mengenai penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diambil beberapa inti permasalahan yang akan menjadi rumusan masalahnya, yaitu bagaimana penyimpangan pengelolaan tersebut terjadi, dan bagaimana penyelesaian penyimpangan pengelolaan tersebut terselesaikan.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Penelitian mengenai penyimpangan di sebuah pasar yang ada di Surabaya memiliki nilai yang cukup penting, karena penelitian yang mengkaji mengenai pengelolaan di pasar-pasar Surabaya belum banyak dilakukan. Kajian mengenai penyimpangan pengelolaan sebuah pasar dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai penyimpangan pengelolaan pasar ke seluruh kalangan.

Selain mempunyai tujuan, setiap penelitian juga bermanfaat bagi akademisi, pemerhati sejarah dan masyarakat umum. Karena penelitian penyimpangan pengelolaan pasar-pasar di Surabaya termasuk penelitian sejarah yang unik serta belum banyak diketahui oleh khalayak umum ataupun kalangan akademisi, maka diharapkan mampu merangsang penelitian sejarah sosial lainnya. Penelitian penyimpangan pengelolaan pasar Wonokromo berusaha menunjukkan mengenai penyimpangan pengelolaan di masa lalu agar bisa dijadikan referensi supaya di masa yang akan datang bisa dicegah, atau dikurangi keberadaannya. Selain itu, penelitian berikut juga dapat memberikan gambaran mengenai peran pemerintah Kota Surabaya dalam menangani penyimpangan pengelolaan yang ada di Pasar Wonokromo dalam kurun waktu 1953-1966.

1.4 Ruang Lingkup Permasalahan

Sebagai sebuah penelitian sejarah, penulisan dibatasi oleh ruang lingkup spasial dan temporal agar pengkajian terhadap permasalahan yang diungkap lebih terfokus. Periodisasi diperlukan untuk membuat waktu terus bergerak tanpa henti menjadi dapat dipahami (*intelligible*) dengan membaginya dalam unit-unit waktu, dalam sekat-sekat, dalam babak-babak, maupun dalam periode. Periodisasi merupakan konsep sejarawan semata-mata, suatu produk mental yang hanya ada dalam pikiran sejarawan, sehingga menjadi tipe ideal dalam karya sejarah. Realitas sejarah itu sesungguhnya terus berkembang tanpa henti, maka pembabakan waktu sebagai konsep yang harus dibuat para sejarawan.²⁰

Skripsi berikut mengambil judul Penyimpangan Pengelolaan di Pasar Wonokromo Surabaya tahun 1953-1966. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai penyimpangan pengelolaan yang ada di Pasar Wonokromo selama tahun 1953 hingga tahun 1966.

Pemilihan ruang lingkup spasial skripsi, yaitu wilayah sekitar Pasar Wonokromo. Dilihat dari segi lokasi, tata letak dari pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar yang sangat strategis di Surabaya. Wonokromo yang berada di selatan kota Surabaya mampu memberikan akses jalan yang cukup bagi kendaraan

²⁰ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana:2008), hlm. 19-20.

bermotor yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut.²¹ Selain itu, letak dari pasar Wonokromo yang dekat dengan berbagai macam fasilitas transportasi umum memberikan akses yang mudah saat dari dan menuju ke pasar Wonokromo. Kemudahan akses pula yang membuat rutinitas di sekitar pasar Wonokromo menjadi sangat ramai saat berlangsungnya kegiatan ekonomi di jam-jam tertentu. Dengan letaknya yang strategis, tak mengherankan bahwa penelitian mengenai pasar Wonokromo akan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pemilihan tahun 1953 sebagai batasan awal ialah karena, di tahun tersebut mulai nampak cara Pemerintah Kota Surabaya memberikan hukuman bagi para pegawai perusahaan daerah pasar surya (PD Surya) ketika mereka terbukti melakukan tindakan curang. Tindakan nyata dan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat itu menunjukkan telah terjadi desakkan oleh para pedagang maupun para saksi yang telah menyaksikan tindakan curang yang dilakukan oleh para oknum tersebut. Serta batasan temporal akhir di tahun 1966 disebabkan karena pada tanggal 25 September 1966, telah terjadi kasus pungutan liar yang dilakukan oleh kepala pasar Wonokromo ke salah satu pedagang di pasar tersebut.²² Kasus pungutan liar memang sering terjadi di Pasar Wonokromo, akan tetapi kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai pasar yang memiliki jabatan cukup tinggi seperti kepala pasar, sangat jarang terungkap. Peristiwa tersebut menjadi batasan akhir dari penelitian, sebab sejak kasus tersebut

²¹ Dony Anggono, *Dinamika Kawasan Wonokromo 1942-1948*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga: 2014), hlm. 2.

²² Arsip Kota Surabaya, No. Sementara 1489, Masih ada Oknum ABRI yang lakukan Pungli, tanggal 13 Desember 1966

memberikan tampan ke pemerintah kota Surabaya supaya memberikan pelayanan ke masyarakat kota Surabaya sesuai aturan yang telah dibuat.

1.5 Tinjauan Pustaka

Salah satu penelitian sejarah yang cukup sering diteliti ialah penelitian yang berkaitan mengenai pasar. Tetapi sayangnya, penelitian mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar belum banyak diteliti, apalagi diulas secara mendetail. Beberapa penelitian yang masih ada kaitannya mengenai penyimpangan yang ada di sekitar pasar antara lain

Skripsi dengan judul Pengelolaan Pasar Keputran Utara Surabaya Tahun 1950-1981 oleh Siti Rohmah.²³ Dalam penulisan skripsi tersebut mendeskripsikan tentang pengelolaan dan aktivitas ekonomi yang ada di Pasar Keputran Utara Surabaya dalam kurun waktu 1950-1981. Pada bagian pengelolaan Pasar Keputran Utara dijelaskan secara detail mulai dari struktur kepegawaian di Perusahaan Pasar hingga tarif sewa yang dikenakan dalam pasar-pasar di Kota Surabaya mampu menjadi referensi penulis. Yang menariknya dalam tulisan berikut ada juga bagian yang menjelaskan mengenai penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi di Pasar Keputran Utara. Materi itu termuat dalam subbab penyelewengan terhadap kebijakan peraturan pasar di Pasar Keputran Utara.

²³ Siti Rohmah, *Pengelolaan Pasar Keputran Utara Surabaya Tahun 1950-1981*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga: 2018)

Dalam subbab itu dijelaskan penyelewengan yang terjadi di Pasar Keputran Utara, mulai dari penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola hingga pedagang di Pasar Keputran Utara. Banyaknya penyelewengan yang dijelaskan dalam skripsi berikut tak sebanding dengan cara penyelesaian yang diberikan untuk menangani masalah yang ada. Salah satu contoh penyelewengan yang dijelaskan mengenai penggelapan dana yang dilakukan pimpinan pasar bernama Soekardi dan juru tagih pasar bernama Soekarno yang menyelewengkan dana dari rekening pasar sejumlah Rp. 116.097,54,- untuk kepentingan pribadi mereka. Penyelesaian tindakan tersebut yang dijelaskan hanya pelaku bertanggung jawab harus bisa melunasi atau menyelesaikan pembayaran uang yang diselewengkan paling lambat 3 November 1972.²⁴ Tidak dijelaskannya mengenai sanksi seperti penurunan jabatan atau tindakan tersebut bisa dibawa ke meja hijau menjadi salah satu penyebab peristiwa sebelumnya sering terjadi dan berulang. Oleh sebab itu pelaku yang melakukan tidak merasa jera atas perbuatannya.

Skripsi dengan judul Integrasi Pasar di Surabaya : Kasus Pasar Kembang 1978-1981 oleh Ahmad Faiz Riza Afthoni.²⁵ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai keberadaan dari pasar Kembang Surabaya selama tahun 1978-1981. Akan tetapi salah satu rumusan masalah yang termuat dalam skripsi berikut menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi di dalam Pasar Kembang pasca proses pembangunan Pasar Kembang Baru. Dengan adanya rumusan masalah

²⁴ Ibid. hlm. 100-101.

²⁵ Ahmad Faiz Riza Afthoni, *Integrasi Pasar di Surabaya : Kasus Pasar Kembang 1978-1981*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga: 2012).

yang diangkat, penulis skripsi mampu membantu peneliti untuk menggambarkan suasana dan detail-detail lainnya saat terjadinya penyimpangan yang ada di dalam Pasar Kembang Baru. Meskipun dalam penulisan skripsi tersebut penggambaran penyimpangan yang ada di dalamnya berdurasi tidak terlalu lama. Serta, pemakaian kerangka konsep dengan isi dari skripsi berikut, kurang mendetail. Meskipun, dari skripsi tersebut dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi di Pasar Kembang selama kurun waktu 1978-1981.

Skripsi dengan judul *Aktivitas Ekonomi Pasar Pabean Surabaya tahun 1918-1982* oleh Eka Diyah Ayu Lestari.²⁶ Keberadaan skripsi berikut cukup membantu peneliti untuk menjelaskan mengenai pasar yang ada di Surabaya karena ada salah satu bab yang membahas hal tersebut. Meskipun secara keseluruhan skripsi membahas seluk beluk kegiatan ekonomi yang ada di Pasar Pabean selama kurun waktu 1918-1982. Tetapi ada salah satu subbab yang mampu membantu penelitian berikut, yaitu subbab yang berjudul *Pelanggaran di Pasar Pabean*. Dalam subbab tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa pelanggaran atau bahkan ada pula yang masuk ke dalam kategori penyimpangan yang terjadi di dalam pasar pabean selama kurun waktu 1918-1982. Subbab tersebut menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi disertai berupa informasi secara umum mengenai penyimpangan yang pernah terjadi di pasar pabean. Meskipun tidak membahas mengenai penyelesaian penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi.

²⁶ Eka Diyah Ayu Lestari, *Aktivitas Ekonomi Pasar Pabean Surabaya tahun 1918-1982*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya: 2018).

Skripsi dengan judul *Dinamika Kawasan Wonokromo 1942-1948* oleh Dony Anggono.²⁷ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai dinamika berbagai macam peristiwa yang telah terjadi di kawasan Wonokromo sejak tahun 1942-1948. Meskipun cakupan ruang lingkup spasial yang dipilih dalam skripsi berikut mencakup hampir seluruh kawasan Wonokromo. Meskipun ada pula beberapa penyimpangan yang dialami oleh pedagang di pasar Wonokromo yang dijelaskan dalam skripsi, yaitu dalam jangka waktu dua bulan sebelum tanggal 12 Oktober 1948 di warung-warung Wonokromo, Pabean Gang I, Grosol Gang 3, Nyamplungan, Tambang-Boyo Srenggana gang lebar, Cita Delwang, Pasar Genteng, dan Pasar Wonokromo muncul pengaduan yang dilakukan oleh beberapa orang yang ingin penjualan mereka menjadi ramai.

Akhirnya, polisi melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang termasuk ke dalam pengaduan tersebut. Padahal ternyata mereka sudah menjual beras berton-ton dengan harga 50 dan 60 sen tiap kilo gilingan antara 70 sen dan f 1-, padahal menurut penetapan pemerintah harga beras per ton hanya 40 sen dan beras gilingan hanya 50 sen.²⁸ Akibat terbukti bersalah dengan menjual harga beras yang tidak sesuai dengan tetapan harga yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka mereka dibawa ke pengadilan untuk diadili. Serta mereka ditetapkan bersalah dalam pengadilan tersebut. Kemudian mereka yang bersalah berterus terang dengan mengungkapkan alasan bahwa karena harga pokok yang ditetapkan

²⁷ Dony Anggono, *Dinamika Kawasan Wonokromo 1942-1948*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga: 2014).

²⁸ Pelita Rakyat, *Awas Uang Kertas*, 30 Januari 1948. Dikutip dalam skripsi Dony Anggono, *Ibid*, hlm. 59-60.

sudah tinggi dan dengan nada tinggi juga mereka tidak menerima bagian beras dari Bie Siang Kee Sie. Ternyata alasan itu tidak mampu mengurangi hukuman mereka. Sehingga mereka dijatuhi hukuman denda yang harus dibayar masing-masing orang sebesar f 25- serta barang bukti beras yang ditemukan di lokasi yang diajukan sebagai barang bukti dirampas.²⁹

Skripsi dengan judul Pasar Wonokromo 1951-1955 oleh Takun Musdha Wirhantoro.³⁰ Skripsi berikut menjelaskan mengenai dinamika pasar Wonokromo selama tahun 1951 hingga tahun 1955. Meskipun inti dari skripsi tersebut membahas mengenai dinamika pasar Wonokromo, akan tetapi fokus penelitian dari skripsi ialah membahas mengenai kondisi pasar Wonokromo pada tahun 1951-1955 dan perencanaan pembangunan pada pasar Wonokromo di tahun tersebut. Dalam skripsi tersebut, peneliti mampu memahami dan menggambarkan secara jelas mengenai keadaan dan kondisi pasar Wonokromo pada tahun 1951 hingga 1955. Menariknya, dalam skripsi juga dibahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh pedagang di pasar Wonokromo pada tahun 1951 hingga 1955. Penyimpangan-penyimpangan tersebut masuk ke dalam subbab masalah-masalah yang dihadapi pasar. Di dalam subbab tersebut menjelaskan mengenai keberadaan pedagang liar di lingkungan pasar.³¹ Dalam penjelasannya, pedagang liar yang ada di pasar Wonokromo menyebabkan keadaan pasar Wonokromo menjadi semrawut dan tidak teratur. Akibatnya warung-warung liar

²⁹ *Ibid*, hlm. 60.

³⁰ Takun Musdha Wirhantoro, *Pasar Wonokromo 1951-1955*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya: 2007).

³¹ Takun Musdha Wirhantoro, *Ibid*, hlm. 48.

atau tidak resmi meluber sampai ke luar wilayah pasar. Bahkan mereka dengan sengaja membuka lapak jualannya hingga memakan sebagian badan jalan raya.³² Sebagian dari warung-warung tersebut juga digunakan sebagai tempat prostitusi.³³

Cara penyelesaian yang dijelaskan dari beberapa penyimpangan dalam skripsi tersebut ialah pada tanggal 14 Januari 1952, Dinas Pengembangan Kota Surabaya mengajukan usulan pembuatan *buurtpasser* (pasar baru) di dalam pasar lama Wonokromo kepada Ketua DPD Kota Besar Surabaya. Para pemilik dari bangunan-bangunan liar tersebut akan dibuatkan suatu proses yang disebut proses verbal. Selain itu ada usulan agar semua bangunan liar yang ada di sekitar pasar Wonokromo dibongkar atas biaya pemilik bangunan tersebut. Dinas Perkembangan Kota Surabaya telah membuat 43 proses verbal terhadap para pelanggar di pasar Wonokromo dan sekitarnya. Akan tetapi, pada tanggal 5 Desember 1952, mereka yang terbukti melanggar aturan tersebut dijatuhi hukuman denda oleh pengadilan dengan membayar biaya denda sebesar Rp. 40 sampai Rp. 150.-. Akibat keberatan akan denda yang dijatuhkan tersebut, sebagian besar yang memiliki bangunan liar tersebut mengajukan permohonan untuk dapat mendirikan bangunan secara resmi di dalam pasar Wonokromo.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Arsip Kota Surabaya, No. Sementara 29.087, Box 1.350, Surat Kepala Dinas Perkembangan Kota R. Soejitno Sosrodidjojo Kepada Ketua DPD KBS tanggal 24 Desember 1952, No. Surat 7600/131, tentang Pasar Wonokromo Lama, Dikutip dari skripsi Takun Musdha Wirhantoro, *Ibid*, hlm. 49.

³⁴ Takun Musdha Wirhantoro, *Ibid*, hlm. 51-52.

Skripsi oleh Shofiyah dengan judul Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya Tahun 1967-1998.³⁵ Skripsi mengambil rumusan masalah yang membahas mengenai pembangunan dan perkembangan pasar loak Dupak Rukun serta membahas mengenai aktivitas Pasar Loak Dupak Rukun tahun 1967-1998. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai rutinitas kegiatan, mulai dari regulasi pemerintah Kota Surabaya tentang Pasar Loak Dupak Rukun hingga aktivitas yang dapat dilakukan di Pasar Loak Dupak Rukun selama kurun waktu 1967-1998. Meskipun dalam skripsi tersebut tidak menyinggung mengenai penyimpangan yang pernah terjadi di Pasar Loak Dupak Rukun, namun dalam bab ketiga yang berjudul pembangunan dan perkembangan pasar loak Dupak Rukun Surabaya tahun 1967-1998 skripsi berikut mampu membantu penulis untuk menyusun bab mengenai regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Pasar Wonokromo.

Jurnal dengan judul Perkembangan Pasar Wonokromo Tahun 1955-2002 Oleh Yongki Leonardo Mait dan Sri Mastuti Purwaningsih.³⁶ Jurnal tersebut memberikan penjelasan mengenai kondisi dan keadaan dari pasar Wonokromo selama rentan waktu 1955-2002. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan hanya gambaran umum mengenai keadaan dan kondisi pasar Wonokromo selama periode tersebut. Meskipun penggambaran dari keadaan dan kondisi pasar Wonokromo yang tidak terlalu spesifik, namun jurnal tersebut mampu membantu

³⁵ Shofiyah, *Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya Tahun 1967-1998*, (Skripsi S-1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya: 2016).

³⁶ Yongki Leonardo Mait dan Sri Mastuti Purwaningsih, *Perkembangan Pasar Wonokromo Tahun 1955-2002*, Jurnal Avatara Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012.

peneliti untuk menjelaskan keadaan dan kondisi pasar Wonokromo di tahun 1955-2002.

Jurnal penelitian dari *Human Organization*, Vol. 69, No. 1 (Spring 2010)³⁷, yang berjudul *Conflict and Cooperation in Market Spaces: Learning from the Operation of Local Networks of Civic Engagement in African Market Trade* yang ditulis oleh Gina Porter, Fergus Lyon, Fatima Adamu dan Lanre Obafemi. Dalam jurnal tersebut diketahui bahwa pasar yang menjadi objek penelitian tersebut mengalami dinamika yang cukup kompleks. Banyak penyimpangan yang berlangsung dalam penelitian tersebut memang termasuk ke dalam kategori penyimpangan abad ke 21. Salah satu penyimpangan yang diangkat dalam penelitian tersebut ialah penyimpangan Jos Plateau di tahun 2001. Penyimpangan tersebut mulai memuncak ketika ketegangan pemilihan umum kepala daerah di wilayah Nigeria. Penyimpangan terjadi antara pihak pribumi dengan pihak dari pemerintah yang diwakili oleh tentara. Pihak yang kontra dengan keputusan pemerintah tentang pemilihan umum kepala daerah. Bentrokan tersebut menyebabkan lebih dari 3000 orang tewas yang tersebar di wilayah kota dan desa di Nigeria. Beberapa bangunan pasar utama di Nigeria ikut terbakar akibat penyimpangan tersebut. Hal itu menyebabkan banyak pedagang yang berdagang di area sekitar pasar yang terbakar tidak bisa berdagang. Dalam jurnal dijelaskan bahwa sebenarnya kekacauan tersebut terjadi karena persaingan ekonomi (tumbuh ketika populasi Ibo di Jos meluas melalui migrasi selama Perang Dunia Kedua),

³⁷ Gina Porter, Fergus Lyon, Fatima Adamu dan Lanre Obafemi, *Conflict and Cooperation in Market Spaces: Learning from the Operation of Local Networks of Civic Engagement in African Market Trade*, Jurnal *Human Organization*, Vol. 69, No. 1 (Spring 2010).

bersama dengan ketidakamanan status / politik di antara Hausa (karena kegiatan dari kaum nasionalis yang dipimpin oleh Ibo Azikiwe).³⁸

Ada beberapa solusi yang diberikan dalam jurnal tersebut, beberapa di antaranya, ialah penyimpangan terkait perdagangan tampaknya terkait dengan masalah yang tidak terkait seputar persaingan atas akses ke tanah. Tanah adalah aset politik, sosial, dan budaya utama dan akibatnya merupakan fokus umum manipulasi politik (Toulmin 2002; Turner 2004). Ketegangan meningkat terutama di daerah pinggiran kota di mana nilai tanah meningkat, minat baru telah memasuki arena, perubahan cepat, dan orang miskin (migran, wanita, dan pengguna musiman seperti penggembala) yang paling maju dan memastikan akses ke tanah untuk keamanan mata pencaharian sangat rentan (Toulmin 2002).³⁹

1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian tersebut akan fokus pada keberadaan dari pasar. Untuk membahas mengenai pasar, maka penggunaan konsep mengenai ekonomi akan sangat membantu menggambarkan arah penelitian tersebut. Sebab fokus penelitian tersebut membahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang ada di Pasar Wonokromo, maka penggunaan konsep penyimpangan juga diperlukan. Pengertian mengenai konsep penyimpangan berbeda-beda menurut para ahli. Definisi konsep penyimpangan yang diterima oleh hal layak umum ialah konsep

³⁸ Gina Porter dkk., *Ibid*, hlm. 33.

³⁹ Gina Porter dkk., *Ibid*, hlm. 34-35.

penyimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; Istilah hukum sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yang berlaku.⁴⁰ Lalu ada pula pengertian Fatimah Tola dan Suardi pengertian penyimpangan adalah konsep masalah sosial berkaitan dengan pelanggaran norma artinya sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat.⁴¹

Konsep pengelolaan menurut Suharsimi Arikunto dapat di sama artikan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.⁴²

Konsep pasar menurut Prianto⁴³, pasar adalah tempat dimana kumpulan para pedagang dan pembeli saling berinteraksi, saling tarik-menarik, dan kemudian menciptakan harga barang di pasar. Penelitian tersebut, akan berusaha untuk menjelaskan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dialami oleh pedagang yang ada di Pasar Wonokromo selama kurun waktu 1953 sampai 1970.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cetakan kedua), (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 510.

⁴¹ Fatimah Tola dan Suardi dalam “Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang Muslim Mappa” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/60848-ID-begal-motor-sebagai-perilaku-menyimpang.pdf> .

⁴² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 31.

⁴³ Agus Prianto, *Ekonomi Mikro*, (Malang: SETARA Press, 2008), hlm. 10.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian sejarah keberadaan fakta sangat diperlukan, dianalisis dan dikembangkan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau meskipun fakta tidak mungkin ditemukan tanpa tersedianya data. Berasal dari data-data itulah fakta dapat ditemukan setelah melalui proses interpretasi, untuk kemudian data baru dapat ditemukan setelah melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah⁴⁴.

Menurut Louis Gottschalk, Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, kemudian penelitian untuk menyimpulkan, mengorganisasikan dan menafsirkan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam khasanah ilmu pengetahuan manusia. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah Metode Sejarah Kritis, yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peristiwa dan peninggalan masa lalu. Metode tersebut merupakan cara pemecahan masalah dengan menggunakan data atau peninggalan-peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa yang terjadi, dan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif.⁴⁵

Dalam penelitian yang menggunakan sejarah, metode penelitian yang pertama dalam penelitian yang harus dilakukan adalah pemilihan topik. Dalam pemilihan topik tersebut penulis berusaha untuk menulis sebuah topik yang sebisa

⁴⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014(diterbitkan kembali)). hlm 90.

⁴⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 18.

mungkin menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kegiatan yang ada di pasar sudah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi penelitian yang meneliti mengenai penyimpangan belum banyak dilakukan. Hal tersebut menyebabkan penulis merasa tertarik untuk meneliti tema tersebut.

Metode selanjutnya yang digunakan adalah heuristik. Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber oleh peneliti. Peneliti akan mencari sumber yang diperlukan di Kantor Arsip Kota Surabaya dan menemukan arsip-arsip primer seperti peraturan-peraturan pasar, blue print rancangan renovasi Pasar Wonokromo, catatan penyelewengan di Pasar Wonokromo, dan cara penyelesaian penyelewengan tersebut. Dari arsip-arsip itu penulis terilhami untuk menulis skripsi dengan tema tersebut Tak lupa peneliti mencari arsip ke Perpustakaan Medokan Ayu Agung lalu menemukan beberapa artikel di majalah yang menulis mengenai Pasar Wonokromo dan beberapa buku referensi yang membantu penulisan skripsi. Penulis lalu pergi ke Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga untuk menambah referensi buku dan jurnal yang dapat membantu penulisan skripsi. Untuk menambah referensi arsip, penulis juga pergi ke Perpustakaan di STIKOM AWS lalu menemukan beberapa artikel koran tahun 1960-1970 mengenai Perusahaan Daerah Pasar dan Pasar Wonokromo. Arsip koran tersebut juga dapat membantu penulis untuk menulis dan menjadi sumber tambahan dalam penulisan skripsi. Penulis juga datang ke ruang baca Ilmu Sejarah di Kampus B Universitas Airlangga untuk membaca skripsi-skripsi terkait serta membaca buku-buku referensi yang sesuai dengan penulisan skripsi. Serta yang terakhir, penulis juga datang ke Bagian Litbang Perusahaan Daerah Pasar

Surya untuk membaca buku terbitan Perusahaan Daerah Pasar Surya yang mampu menjadi referensi serta melakukan wawancara ke beberapa pegawai Perusahaan Daerah Pasar Surya.

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian adalah tahap verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahap tersebut butuh kejelian dan ketelitian peneliti dalam memverifikasi sumber-sumber yang telah ditemukan oleh peneliti. Serta butuh tenaga ekstra untuk membuktikan kebenaran mengenai fakta-fakta yang ada di dalam sumber-sumber yang telah ditemukan peneliti, dengan cara membandingkan sumber-sumber yang telah ditemukan dengan sumber-sumber lain yang telah relevan seperti buku yang memang sudah teruji kebenarannya.

Metode selanjutnya setelah berhasil membuktikan kebenaran dari sumber-sumber tersebut adalah tahap interpretasi. Dari tahap tersebut sudut pandang peneliti akan sangat mempengaruhi hasil dari tulisan tersebut. Akibatnya setiap orang yang ada memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang lain

Metode terakhir dalam penelitian adalah historiografi. Tahap tersebut adalah tahap penulisan setelah melewati tahap-tahap metode penelitian sebelumnya mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir adalah tahap historiografi yaitu tahap penelitian dari hasil penelitian tersebut ke dalam tulisan sejarah yang relevan dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dari karya tersebut, akan dibuat menjadi empat bab yang terdiri dari, Bab I yang berisikan pendahuluan. Dalam bab pertama meliputi subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konsep, ruang lingkup pembahasan, tinjauan pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan perkembangan Pasar Wonokromo di Kota Surabaya terutama selama kurun waktu 1953-1970. Di dalam bab pertama juga akan dijelaskan mengenai eksistensi Pasar Wonokromo, pengelolaan Pasar Wonokromo, retribusi yang berlaku di Pasar Wonokromo dan akan sedikit disinggung mengenai penyimpangan-penyimpangan pengelolaan di Pasar Wonokromo.

Bab III menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi di Pasar Wonokromo. Penyimpangan yang terjadi menjelaskan mengenai penyimpangan pengelolaan yang pernah terjadi di Pasar Wonokromo. Penyimpangan tersebut akan memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya, pihak yang terkait penyimpangan pengelolaan, faktor-faktor penyebab, dan peran pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan penyimpangan pengelolaan di Pasar Wonokromo.

Bab IV berisikan penutup dan kesimpulan. Seluruh inti dari penelitian tersebut akan terjawab dalam bab tersebut. Selain itu, keberadaan dari kesimpulan juga membahas mengenai hasil dari pembahasan dan penelitian.